

**NOTULEN RAPAT PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBBM
SATKER PUSKEU POLRI T.A. 2025**

1. Rujukan:

- 1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- 2) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/432/IV/2022 tentang Petunjuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Polri.

2. Pelaksanaan:

- a. Hari : Senin;
- b. Tanggal : 6 Januari 2025;
- c. Pukul : 08.00 WIB s.d. selesai
- d. Tempat : Rapat Puskeu Polri

3. Peserta Rapat:

- a. Pimpinan Rapat:
 - Kapuskeu Polri
- b. Peserta Rapat:
 - Para Kabid
 - Kabidkeu I dan II Mabes
 - Anjak Puskeu
 - Para Kaurmin/Pamin

4. Pelaksanaan

Rapat dibuka oleh Kapuskeu Polri dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

1) Arahan

1) Arahan Kapuskeu Polri

- a) Ucapan terima kasih dari Kapuskeu Polri atas atensi dari seluruh peserta rapat yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan rapat pembentukan tim Pokja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b) Bahwa tujuan dalam rapat pembentukan tim Pokja Pembangunan ZI tahun ini untuk memilih anggota personel pelaksana dalam program yang telah dibuat pada Satker Puskeu Polri untuk Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM T.A. 2025

2) Arahan Ketua Tim program I Manajemen Perubahan

Bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan cultureset (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini:

- a) terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Satker/Satwil yang diusulkan sebagai ZI menuju WBBM;
- b) menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- c) terimplementasikannya core value ASN berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif).

3) Arahan Ketua Tim program II Penataan Tatalaksana

Penataan tata laksana, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada ZI menuju WBBM.

Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini yaitu:

- a) meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di ZI menuju WBBM;
- b) meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di ZI menuju WBBM;
- c) meningkatnya kinerja di ZI menuju WBBM.

4) Arahan

4) Arahan Ketua Tim program III Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan Sistem Manajemen SDM di lingkungan Polri bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Polri pada ZI Menuju WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini yaitu:

- a) meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan Polri pada masing-masing ZI menuju WBBM;
- b) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di lingkungan Polri pada masing-masing ZI menuju WBBM;
- c) meningkatnya disiplin SDM di lingkungan Polri pada masing-masing ZI menuju WBBM;
- d) meningkatnya efektivitas manajemen SDM di lingkungan Polri pada ZI menuju WBBM;
- e) meningkatnya profesionalisme SDM di lingkungan Polri pada ZI menuju WBBM

5) Arahan Ketua Tim program IV Penguatan Akuntabilitas

Kinerja Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Polri. Target yang ingin dicapai melalui program ini yaitu:

- a) meningkatnya kinerja instansi pemerintah;
- b) meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

6) Arahan Ketua Tim program V Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Polri yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Target yang ingin dicapai melalui program ini yaitu:

- a) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
- b) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Satker/Satwil;
- c) meningkatnya sistem integritas di Satker/Satwil dalam upaya pencegahan KKN.

7) Arahan Ketua Tim program VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik di lingkungan Polri secara

berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini yaitu:

- a) meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau di jajaran Polri;
- b) meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan nasional dan/atau internasional;
- c) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Jakarta, 6 Januari 2025

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI